Research Article

Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah dalam Perekonomian Provinsi Lampung: Analisis Data Tabel *Inter Regional Input Output* (IRIO) Tahun 2016

Ihsan Maulid Rahmawan*, Widdia Angraini

Badan Pusat Statistik, Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Article history:

Submission September 2021

Revised October 2021

Accepted October 2021

*Corresponding author:

E-mail:

ihsan.maulid@bps.go.id

ABSTRACT

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki potensi untuk mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam perekonomiannya, Provinsi Lampung memiliki potensi terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan. Analisis ekonomi secara lebih komprehensif tidak hanya mengamati keterkaitan antar sektor ekonomi melainkan juga perlu mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perekonomian Provinsi Lampung bukan hanya dengan menganalisis keterkaitan antar sektornya, tetapi juga menganalisis keterkaitannya dengan wilayah lain di Indonesia. Model yang digunakan adalah analisis tabel *Inter-Regional Input-Output* (IRIO). Tabel IRIO yang digunakan berukuran 17 industri x 34 provinsi diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor kunci di Provinsi Lampung adalah industri pengolahan (C) serta pengadaan listrik dan gas (D). Sektor pengadaan listrik dan gas (D) memiliki nilai pengganda output terbesar baik terhadap perekonomian Provinsi Lampung maupun terhadap perekonomian nasional. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (A) memiliki nilai pengganda NTB yang relatif paling besar baik terhadap perekonomian Provinsi Lampung maupun terhadap perekonomian nasional. Jika dilihat dari pola perdagangan input antaranya, perdagangan input antara Provinsi Lampung secara umum lebih didominasi oleh perdagangan dengan wilayah Pulau Jawa dibandingkan dengan Pulau Sumatera. Selanjutnya, apabila dilihat menurut provinsinya, Provinsi Lampung memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) paling erat dengan Provinsi Sumatera Selatan serta provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Kata kunci: *backward linkage, forward linkage, input-output, IRIO*

How to cite:

Rahmawan, I. M. & Angraini, W. (2021). Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah dalam Perekonomian Provinsi Lampung: Analisis Data Tabel *Inter Regional Input Output* (Irio) Tahun 2016. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*. 1 (3), 227 – 243. doi: 10.11594/jesi.01.03.09

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi suatu negara dapat terlihat dari perubahan struktur perekonomian di negara yang bersangkutan. Selain mengamati perubahan struktural dalam hal keterkaitan sektoral, menjadi hal yang penting juga untuk mengamati keterkaitan antar wilayah dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional. Keterkaitan antar sektor menjadi penting untuk diamati karena suatu sektor akan membutuhkan sektor lain baik sebagai penyedia inputnya dan atau sebagai pengguna output dari sektor bersangkutan. Selanjutnya, keterkaitan wilayah juga menjadi suatu hal yang penting karena terdapatnya perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah sehingga tidak semua input yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu output tersedia di dalam suatu daerah tersebut. Selain itu, desentralisasi ekonomi dimana setiap daerah dapat memiliki kebijakan dalam proses pembangunan yang berbeda-beda dapat menimbulkan pengaruh terhadap pembangunan secara keseluruhan.

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki potensi untuk mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Redaputri dan Barusman (2018) menyatakan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional, karena sebagian besar tanaman pangan, hasil perkebunan dan perikanan terdapat di Provinsi Lampung. Adapun beberapa contoh komoditas unggulan yang menjadi produk unggulan Provinsi Lampung antara lain jagung, coklat, gula, kopi, ubi kayu, udang, dan nanas. Seperti halnya jagung, pada

tahun 2015, Provinsi Lampung merupakan produsen jagung nomor tujuh di Indonesia. Selain itu, Provinsi Lampung juga memiliki produksi coklat nomor enam terbesar di Indonesia. Untuk hasil tebu yang diolah menjadi gula, Lampung merupakan produsen gula nomor empat di Indonesia. Selanjutnya, Provinsi Lampung merupakan produsen kopi nomor dua di Indonesia. Provinsi Lampung juga merupakan produsen ubi kayu, udang, dan nanas nomor satu di Indonesia. Untuk penghasil udang, Provinsi Lampung sebagai penghasil udang terbesar yang berkontribusi sebesar 60 persen nasional. Hal demikian menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki peran yang cukup potensial dalam perekonomian nasional.

Berikut ini merupakan data yang menunjukkan distribusi PDRB Provinsi Lampung menurut lapangan usaha. Berdasarkan tabel 1, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan atau kontribusi terbesar dalam membentuk PDRB Provinsi Lampung yaitu sebesar 31,76 persen pada tahun 2016 lalu terus mengalami penurunan sampai menjadi sebesar 29,90 persen pada tahun 2020. Sektor yang memiliki kontribusi tersesar setelah pertanian yaitu sektor industri pengolahan dimana memiliki kontribusi sebesar 18,70 persen pada tahun 2016 lalu cenderung terus mengalami peningkatan sampai akhirnya menjadi sebesar 19,41 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya suatu pergeseran ekonomi struktural dari sektor primer ke sektor sekunder.

Tabel 1. Distribusi PDRB Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016- 2020

Lapangan Usaha (Triwulanan)	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,76	30,57	29,90	28,80	29,90
B. Pertambangan dan Penggalan	5,49	5,65	5,74	5,55	5,06
C. Industri Pengolahan	18,70	19,02	19,50	20,00	19,41
D. Pengadaan Listrik, Gas	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16
E. Pengadaan Air	0,10	0,11	0,10	0,10	0,11
F. Konstruksi	8,80	9,34	9,48	9,53	9,35
G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	11,02	11,04	11,16	11,60	11,14
H. Transportasi dan Pergudangan	5,25	5,28	5,18	5,24	5,01

Lapangan Usaha (Triwulanan)	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,53	1,58	1,63	1,56
J. Informasi dan Komunikasi	3,75	3,92	3,93	3,99	4,31
K. Jasa Keuangan	2,22	2,21	2,15	2,09	2,18
L. Real Estate	2,90	2,91	2,84	2,96	2,99
M, N. Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15
O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	3,53	3,51	3,45	3,39	3,62
P. Jasa Pendidikan	2,85	2,78	2,82	2,92	3,08
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	0,95	0,94	0,95	1,07
R, S, T, U. Jasa lainnya	0,87	0,90	0,92	0,95	0,91
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Tarigan (2005) menyatakan bahwa, karena keterkaitan antarsektor yang begitu luas, perubahan pada salah satu sektor, misalnya outputnya meningkat atau menurun, akan memberi dampak pada sektor lainnya. Perubahan itu umumnya berasal dari berubahnya permintaan akhir dari salah satu sektor atau beberapa sektor sekaligus. Apabila permintaan akhir suatu sektor berubah, ini akan mengubah permintaannya (berupa input) dari berbagai sektor dan perubahan ini akan berlangsung dalam beberapa putaran. Namun, analisis ekonomi secara lebih komprehensif tidak hanya mengamati keterkaitan antar sektor ekonomi melainkan juga perlu mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan sektoral dan regional dalam perekonomian Provinsi Lampung menggunakan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*); menganalisis angka pengganda output serta angka pengganda NTB dalam perekonomian Provinsi Lampung menggunakan pendekatan analisis tabel Inter Regional Input Output (IRIO) Tahun 2016.

Tarigan (2005) menyatakan bahwa, karena keterkaitan antarsektor yang begitu luas, perubahan pada salah satu sektor, misalnya outputnya meningkat atau menurun, akan memberi dampak pada sektor lainnya. Perubahan itu umumnya berasal dari berubahnya permintaan akhir dari salah satu sektor atau beberapa sektor sekaligus. Apabila permintaan akhir suatu sektor berubah, ini akan mengubah permintaannya (berupa input) dari berbagai

sektor dan perubahan ini akan berlangsung dalam beberapa putaran. Namun, analisis ekonomi secara lebih komprehensif tidak hanya mengamati keterkaitan antar sektor ekonomi melainkan juga perlu mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan sektoral dan regional dalam perekonomian Provinsi Lampung menggunakan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*); menganalisis angka pengganda output serta angka pengganda NTB dalam perekonomian Provinsi Lampung menggunakan pendekatan analisis tabel Inter Regional Input Output (IRIO) Tahun 2016.

Metodologi

Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tabel *Inter Regional Input Output* (IRIO) tahun 2016 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Klasifikasi yang digunakan adalah 17 lapangan usaha dan 34 provinsi. Transaksi yang digunakan adalah transaksi domestik, dimana transaksi yang dicatat di masing-masing provinsi telah memisahkan komponen ekspor dan impor, baik ekspor-impor antar provinsi maupun ekspor-impor dengan luar negeri. Selanjutnya, penilaian yang digunakan adalah harga produsen, sehingga transaksi yang dicatat masih mengandung pajak atas produk neto yaitu belum memisahkan campur tangan pemerintah terhadap pajak dan subsidi atas produk.

Analisis Input-Output

Analisis Input-Output merupakan metode yang digunakan untuk melihat keterkaitan (*interdependence*) antara suatu sektor produksi dengan sektor produksi lainnya dalam suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu. Analisis Input-Output ini pertama kali dikembangkan oleh *Wassiley Leontief* pada tahun 1930-an. Analisis ini merupakan penyederhanaan dari teori keseimbangan umum yang dikembangkan oleh *Leon Walras*. Dengan adanya Analisis Input-Output ini, teori keseimbangan umum menjadi lebih sederhana dan menjadi mungkin untuk diterapkan secara empiris (Suratman & Irawan, 2009). Komponen yang paling penting dalam analisis Input-Output adalah matriks kebalikan tabel Input-Output, yang familiar disebut sebagai *inverse* Leontief (Miller, 1999:15). Matriks tersebut mengandung informasi terkait bagaimana kenaikan produksi dari suatu sektor (industri) akan menyebabkan dampak terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya.

Sesuai dengan asumsi dasar yang digunakan dalam proses penyusunannya, model input-output bersifat statis dan terbuka. Asumsi dasar dalam penyusunan Tabel I-O adalah (Badan Pusat Statistik, 2021):

- Keseragaman (*Homogeneity*)**
Asumsi ini menunjukkan bahwa setiap sektor ekonomi hanya memproduksi satu jenis barang dan jasa dengan susunan input tunggal (seragam) dan tidak ada substitusi otomatis terhadap input dari output sektor yang berbeda.
- Kesebandingan (*Proportionality*)**
Hubungan antara input dan output setiap sektor mengikuti prinsip fungsi linier. Artinya, kenaikan dan penurunan output suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan dan penurunan input yang digunakan oleh sektor tersebut.
- Penjumlahan (*Additivity*)**
Asumsi ini menunjukkan bahwa total efek dari kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan penjumlahan dari efek kegiatan masing-masing sektor yang terpisah.

Berikut adalah beberapa kegunaan dari Tabel I-O:

- Melihat komposisi penyediaan dan penggunaan barang dan jasa, terutama dalam analisis kebutuhan impor dan kemungkinan substitusinya.
- Mengetahui sektor-sektor yang pengaruhnya paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor yang peka terhadap pertumbuhan perekonomian nasional/regional.
- Memperkirakan dampak permintaan akhir terhadap output, nilai tambah, impor, penerimaan pajak, dan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor produksi.

Koefisien Input dan Angka Pengganda

Misalkan nilai uang arus barang dari sektor i ke sektor j dinotasikan dengan z_{ij} , output dari sektor i dinotasikan dengan x_i , dan total permintaan akhir dari sektor i dinotasikan dengan y_i , maka total output dari sektor i dapat dituliskan sebagai berikut (Daryanto & Hafizrianda, 2010):

$$x_i = \sum_{j=1}^n z_{ij} + y_i \quad \dots\dots\dots(1)$$

Jika kita definisikan suatu koefisien input $a_{ij} = z_{ij}/x_j$, maka persamaan (1) dapat diubah bentuknya menjadi:

$$x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + y_i \quad \dots\dots\dots(2)$$

Atau dalam bentuk vektor dan matriks dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\mathbf{x} = \mathbf{Ax} + \mathbf{y} \quad \dots\dots\dots(3)$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Matriks $\mathbf{A}$ disebut sebagai matriks teknologi. Dengan sedikit modifikasi, persamaan (3) dapat menghasilkan matriks pengganda output sebagai berikut:

$$\begin{aligned}(I - A)x &= y \\ x &= (I - A)^{-1}y \\ x &= G y \quad \dots\dots\dots(4)\end{aligned}$$

Matriks G adalah matriks pengganda output atau sering juga disebut sebagai matriks kebalikan Leontief. Kekuatan peramalan dalam model input-output terletak pada matriks G ini. Dengan matriks tersebut kita dapat meramalkan dampak perubahan setiap variabel eksogen dalam permintaan akhir terhadap perubahan output. Angka pengganda output dapat diturunkan sebagai berikut:

$$O_j = \sum_{i=1}^n g_{ij} \quad \dots\dots\dots(5)$$

dengan O_j adalah angka pengganda output dari sektor j dan g_{ij} adalah elemen dari matriks G .

Angka pengganda output mengukur output total yang tercipta akibat adanya perubahan satu unit permintaan akhir di suatu sektor. Selain angka pengganda output, dapat pula diturunkan angka pengganda Nilai Tambah Bruto (NTB) sebagai berikut:

$$NTB_j = \sum_{i=1}^n g_{ij} v_i \quad \dots\dots\dots(6)$$

dengan NTB_j adalah angka pengganda NTB dari sektor j , g_{ij} adalah elemen dari matriks G , dan v_i adalah rasio NTB dari sektor i .

Angka pengganda NTB mengukur pendapatan total yang tercipta akibat adanya perubahan satu unit permintaan akhir di suatu sektor.

Keterkaitan Antar Sektor dan Sektor Kunci

Setiap sektor dalam perekonomian tidak berdiri sendiri, namun terintegrasi. Output dari suatu sektor merupakan input bagi sektor lainnya, begitu pula sebaliknya. Hubungan saling ketergantungan tersebut menciptakan keterkaitan antar sektor. Keterkaitan antar sektor dibagi menjadi dua bagian, yaitu keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Ukuran keterkaitan ke belakang pada suatu sektor beranjak dari model Leontief dengan melihat sisi permintaan (*demand-driven*), sedangkan ukuran

keterkaitan ke depan dilihat dari sisi penawaran (*supply-driven*). Rasmussen (1958) mengajukan ukuran keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan sebagai berikut:

$$BL_j = \sum_{i=1}^n g_{ij} \quad \dots\dots\dots(7)$$

$$FL_i = \sum_{j=1}^n g_{ij} \quad \dots\dots\dots(8)$$

dengan BL_j adalah keterkaitan ke belakang dari sektor j , FL_i adalah keterkaitan ke depan dari sektor i , dan g_{ij} adalah elemen dari matriks kebalikan Leontief, $G = (I - A)^{-1}$.

Ukuran keterkaitan yang diajukan oleh Rasmussen (1958) lebih baik dibandingkan dengan ukuran keterkaitan Chenery & Watanabe (1958) karena telah memperhitungkan keterkaitan langsung maupun tidak langsung. Nilai keterkaitan ke belakang (BL_j) berdasarkan ukuran Rasmussen sama dengan angka pengganda output, yaitu merefleksikan pengaruh dari kenaikan permintaan akhir pada sektor j terhadap output perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan nilai keterkaitan ke depan (FL_i) merefleksikan besarnya kenaikan output pada sektor i jika permintaan akhir pada setiap sektor lainnya naik sebanyak satu unit.

Rasmussen (1958) juga memberikan dua jenis ukuran indeks yang disebut kemampuan penyebaran (*power of dispersion*) dan kepekaan penyebaran (*sensitivity of dispersion*). Kedua jenis indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor kunci dalam pembangunan ekonomi. BPS (1999) memberikan istilah Indeks Daya Penyebaran (IDP) untuk kemampuan penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) untuk kepekaan penyebaran. Formula dari masing-masing indeks tersebut adalah sebagai berikut:

$$IDP_j = \frac{\sum_{i=1}^n g_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_i \sum_j g_{ij}} \quad \dots\dots\dots(9)$$

$$IDK_i = \frac{\sum_{j=1}^n g_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_i \sum_j g_{ij}} \quad \dots\dots\dots(10)$$

IDP dan IDK merupakan perbandingan dampak, baik ke belakang maupun ke depan, terhadap rata-rata dampak seluruh sektor.

Dengan demikian, nilai IDP > 1 menunjukkan bahwa keterkaitan ke belakang dari sektor tersebut lebih tinggi daripada rata-rata keterkaitan ke belakang seluruh sektor. Begitu pula, nilai IDK > 1 menunjukkan bahwa keterkaitan ke depan dari sektor tersebut lebih tinggi daripada rata-rata keterkaitan ke depan seluruh sektor. Suatu sektor dengan IDP dan IDK yang lebih besar dari satu dikategorikan sebagai sektor kunci atau sektor unggulan.

Analisis Model IRIO

Misalkan terdapat tiga daerah dengan A_{ij} adalah matriks teknologi akibat penggunaan

$$x_1 = F_{11}M_{11}y_1 + F_{11}N_{12}M_{22}y_2 + F_{11}N_{13}M_{33}y_3 \dots\dots\dots(12)$$

dengan $F_{11} = [I - S_{12}(I - S_{23}S_{32})^{-1}(S_{21} + S_{23}S_{31}) - S_{13}(I - S_{32}S_{23})^{-1}(S_{31} + S_{32}S_{21})]^{-1}$ adalah *feedback effect* pada daerah 1 yang disebabkan oleh daerah 2 dan 3, $M_{11} = (I - A_{11})^{-1}$ adalah matriks pengganda pada daerah 1, $M_{22} = (I - A_{22})^{-1}$ adalah matriks pengganda pada daerah 2, $N_{12} = S_{12}(I - S_{23}S_{32})^{-1} + S_{13}(I - S_{32}S_{23})^{-1}S_{32}$ adalah efek *spillover* pada

input antara pada daerah j dari daerah i , x_j adalah vektor output pada daerah j , dan y_j adalah vektor permintaan akhir pada daerah j . Model *interregional input-output* dari kasus tersebut adalah sebagai berikut (Chen et al., 2020):

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \dots\dots(11)$$

Jika didefinisikan $S_{ji} = (I - A_{jj})^{-1}A_{ji}$, maka total output pada daerah 1 dapat dituliskan sebagai berikut:

daerah 1 yang berasal dari daerah 2, $M_{33} = (I - A_{33})^{-1}$ adalah matriks pengganda pada daerah 3, dan $N_{13} = S_{13}(I - S_{32}S_{23})^{-1} + S_{12}(I - S_{23}S_{32})^{-1}S_{23}$ adalah efek *spillover* pada daerah 1 yang berasal dari daerah 3.

Dengan demikian, model *interregional input-output* pada persamaan (11) dapat ditransformasi menjadi:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{11} & 0 & 0 \\ 0 & F_{22} & 0 \\ 0 & 0 & F_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & N_{12} & N_{13} \\ D_{21} & I & D_{23} \\ D_{31} & D_{32} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_{11} & 0 & 0 \\ 0 & M_{22} & 0 \\ 0 & 0 & M_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \dots\dots\dots(13)$$

Matriks kebalikan Leontief dalam model IRIO dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$G = \begin{bmatrix} F_{11}M_{11} & F_{11}N_{12}M_{22} & F_{11}N_{13}M_{33} \\ F_{22}N_{21}M_{11} & F_{22}M_{22} & F_{22}N_{23}M_{33} \\ F_{33}N_{31}M_{11} & F_{33}N_{32}M_{22} & F_{33}M_{33} \end{bmatrix} \dots\dots\dots(14)$$

Model di atas memiliki makna bahwa dampak perubahan output akibat *shock* permintaan akhir regional dapat didekomposisikan menjadi perkalian dari dampak pengganda regional, efek *spillover* regional, dan *feedback effect*.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Perekonomian Provinsi Lampung

Tabel 2 menampilkan neraca penyediaan dan penggunaan barang dan jasa dari perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2016. Berdasarkan tabel 1, total barang dan

jasa dari perekonomian lampung pada tahun 2016 adalah sebesar Rp609.767,198 milyar. Apabila dilihat dari sumber diperolehnya barang dan jasa tersebut, dapat diketahui bahwa barang dan jasa di Provinsi Lampung didominasi oleh output yang berasal dari domestik (dari Provinsi Lampung itu sendiri) yaitu sebesar 77,69 persen. Sedangkan sisanya bersumber dari output yang berasal dari provinsi lain dan luar negeri yang mana secara berturut-turut kontribusinya sebesar 14,52 persen dan 7,78 persen. Selanjutnya, dari sisi penggunaannya, sebagian besar barang dan jasa digunakan untuk permintaan antara yaitu

sebesar 34,62 persen; konsumsi rumah tangga sebesar 25,86 persen; ekspor antar provinsi sebesar 14,26 persen; serta PMTB sebesar

14,02 persen. Sisanya digunakan untuk ekspor luar negeri, konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT, serta perubahan inventori.

Tabel 2. Neraca barang dan jasa dari perekonomian Provinsi Lampung tahun 2016 (juta rupiah)

Penggunaan			Sumber		
Deskripsi	Nilai	%	Deskripsi	Nilai	%
Permintaan Antara	211.121.307	34,62	Output Domestik	473.740.055	77,69
Konsumsi Rumah Tangga	157.660.004	25,86	Impor Antar Provinsi	88.562.620	14,52
Konsumsi LNPRT	3.730.052	0,61	Impor Luar Negeri	47.464.523	7,78
Konsumsi Pemerintah	23.496.491	3,85			
PMTB	85.500.400	14,02			
Perubahan Inventori	2.267.360	0,37			
Ekspor Antar Provinsi	86.980.273	14,26			
Ekspor Luar Negeri	39.011.311	6,40			
Total	609.767.198	100,00	Total	609.767.198	100,00

Sumber: Tabel I-O Provinsi Lampung 2016 (data diolah)

Gambar 1 menampilkan struktur ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2016. Berdasarkan gambar tersebut, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Provinsi Lampung yaitu sebesar 56,05 persen. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar

27,81 persen; industri pengolahan berkontribusi sebesar 16,03 persen; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 12,21 persen. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi terkecil terhadap perekonomian Provinsi Lampung yaitu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 0,12 persen.

Sumber: Tabel I-O Provinsi Lampung 2016 (data diolah)

Gambar 1. Struktur ekonomi Provinsi Lampung tahun 2016

Gambar 2 menampilkan rasio Nilai Tambah Bruto (NTB) masing-masing lapangan usaha di

Provinsi Lampung. Berdasarkan gambar 2 tersebut, dapat dilihat bahwa lapangan usaha

yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Provinsi Lampung juga memiliki rasio NTB terbesar pula dibandingkan yang lainnya. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki rasio NTB sebesar 0,83 persen; industri pengolahan memiliki rasio NTB sebesar 0,82 persen; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki rasio NTB sebesar

0,78 persen. Dengan kata lain, ketiga lapangan usaha tersebut dapat menciptakan 78 hingga 83 persen pendapatan primer yang terdiri dari kompensasi bagi pekerja, surplus usaha, serta pajak atas produksi. Di sisi lain, lapangan usaha yang memiliki rasio NTB terkecil yaitu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 0,14 persen.

Sumber: Tabel I-O Provinsi Lampung 2016 (data diolah)

Gambar 2. Rasio Nilai Tambah Bruto (NTB) lapangan usaha di Provinsi Lampung tahun 2016

Gambar 3 menunjukkan destinasi ekspor dan daerah asal impor Provinsi Lampung tahun 2016. Berdasarkan gambar 3, Provinsi Lampung lebih banyak melakukan ekspor antar provinsi dibandingkan dengan luar negeri. Ekspor antar provinsi memiliki persentase sebesar 67,52 persen sedangkan sisanya sebesar 32,48 persen merupakan ekspor untuk luar negeri. Provinsi destinasi ekspor yang memiliki proporsi paling besar yaitu Provinsi Banten (16,91%), Provinsi Jawa Barat (11,70%), Provinsi DKI Jakarta (10,67%), serta Provinsi Sumatera Selatan (8,77%). Ekspor Provinsi Lampung ke Banten paling banyak berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Disamping itu, ekspor Provinsi Lampung ke Jawa Barat, DKI Jakarta, serta luar negeri paling banyak berasal dari sektor industri pengolahan. Selanjutnya, ekspor Provinsi Lampung ke Sumatera Selatan paling banyak berasal dari sektor pertambangan dan penggalan.

Selain menunjukkan destinasi ekspor, gambar 3 juga menampilkan daerah asal impor

Provinsi Lampung pada tahun 2016. Impor Provinsi Lampung lebih banyak bersumber dari impor antar provinsi dibandingkan dari luar negeri. Impor antar provinsi memiliki persentase sebesar 65,11 persen sedangkan sisanya sebesar 34,89 persen merupakan impor yang bersumber dari luar negeri. Provinsi asal impor untuk Provinsi Lampung yang memiliki proporsi paling besar yaitu Provinsi Jawa Timur (13,82%), Provinsi Banten (10,96%), Provinsi DKI Jakarta (8,60%), serta Provinsi Sumatera Selatan (7,65%). Impor dari Provinsi Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, serta luar negeri paling banyak bersumber dari sektor industri pengolahan, sedangkan impor dari Provinsi Sumatera Selatan paling banyak bersumber dari sektor pertambangan dan penggalan.

Tabel 3 menunjukkan sumber input antara masing-masing lapangan usaha di Provinsi Lampung tahun 2016. Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat diamati bahwa input antara lapangan usaha di Provinsi Lampung secara umum

masih didominasi oleh sumber input yang berasal dari dalam Provinsi Lampung (domestik). Hampir seluruh lapangan usaha memiliki persentase sumber input antara dari domestik di atas 50 persen, kecuali sektor transportasi dan pergudangan. Sektor yang memiliki persentase sumber input antara dari domestik terbesar adalah industri pengolahan yaitu sebesar 75,02 persen. Hal demikian berarti bahwa untuk

melakukan proses produksinya, industri pengolahan tidak memiliki ketergantungan yang terlalu besar dari komponen impor. Selanjutnya, sektor yang memiliki ketergantungan terhadap impor yang cukup tinggi adalah transportasi dan pergudangan dimana memiliki persentase sumber input antara dari impor sebesar 56,82 persen (34,38 persen dari luar negeri dan 22,44 persen dari provinsi lain).

Sumber: Tabel I-O Provinsi Lampung 2016 (data diolah)

Gambar 3. Destinasi ekspor dan daerah asal impor Provinsi Lampung tahun 2016

Tabel 3. Sumber input antara masing-masing lapangan usaha di Provinsi Lampung tahun 2016

Kategori Lapangan Usaha	Deskripsi	Sumber Input Antara (%)			Total
		Domestik	Impor dari Luar Negeri	Impor dari Provinsi Lain	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	72,52	12,90	14,58	100,00
B	Pertambangan dan Penggalian	62,56	6,44	31,00	100,00
C	Industri Pengolahan	75,02	8,30	16,68	100,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	66,59	2,17	31,24	100,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	72,18	2,20	25,62	100,00
F	Konstruksi	68,36	12,80	18,84	100,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	72,91	3,17	23,92	100,00
H	Transportasi dan Pergudangan	43,18	34,38	22,44	100,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78,89	12,75	8,36	100,00
J	Informasi dan Komunikasi	82,35	1,69	15,96	100,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	70,06	5,55	24,39	100,00
L	Real Estate	72,72	6,62	20,66	100,00
MN	Jasa Perusahaan	61,44	4,61	33,95	100,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	68,26	3,48	28,26	100,00
P	Jasa Pendidikan	59,34	4,15	36,51	100,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,43	7,06	29,51	100,00

Kategori Lapangan Usaha	Deskripsi	Sumber Input Antara (%)			
		Domestik	Impor dari Luar Negeri	Impor dari Provinsi Lain	Total
RSTU	Jasa Lainnya	68,38	8,24	23,39	100,00

Sumber: Tabel I-O Provinsi Lampung 2016 (data diolah)

Analisis Keterkaitan Antar Sektor di Provinsi Lampung

Tabel 4 menampilkan matriks keterkaitan antar sektor di Provinsi Lampung pada tahun 2016. Warna dalam setiap sel menunjukkan seberapa besar tingkat keterkaitan antar sektor. Warna kuning menunjukkan tingkat keterkaitan antar sektor yang rendah, warna jingga menunjukkan tingkat keterkaitan moderat, serta warna merah menunjukkan tingkat keterkaitan yang tinggi. Analisis secara kolom menunjukkan besaran dampak dari perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output sektor lainnya di Provinsi Lampung. Selanjutnya, analisis secara baris menunjukkan dampak yang terjadi terhadap output suatu sektor akibat adanya perubahan permintaan akhir pada sektor lainnya di Provinsi Lampung.

Jika dianalisis secara kolom, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) serta informasi dan komunikasi (J) mengakibatkan dampak yang rendah terhadap perubahan output sektor lain di Provinsi Lampung ketika mengalami perubahan pada permintaan akhirnya. Sektor jasa pendidikan (P) memiliki mengakibatkan dampak yang tinggi untuk

output sektor lain di Provinsi Lampung ketika mengalami perubahan pada permintaan akhirnya, sedangkan sektor lain secara umum nampak mengakibatkan dampak yang moderat. Jika dianalisis secara baris, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (E); penyediaan akomodasi dan makan minum (I); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (O); jasa pendidikan (P); serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial (Q) secara umum memiliki respon dampak perubahan output yang rendah ketika adanya perubahan permintaan akhir dari sektor lainnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (A); industri pengolahan (C); pengadaan listrik dan gas (D); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (G); transportasi dan pergudangan (H); informasi dan komunikasi (J); serta jasa keuangan dan asuransi (K) secara umum memiliki respon dampak perubahan output yang tinggi ketika adanya perubahan permintaan akhir dari sektor lainnya, sedangkan sektor sisanya memiliki respon dampak perubahan output yang moderat.

Tabel 4. Keterkaitan antar sektor di Provinsi Lampung tahun 2016

Kategori	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M,N	O	P	Q	R,S,T,U
A	1,056	0,009	0,333	0,005	0,034	0,054	0,011	0,008	0,225	0,001	0,011	0,011	0,009	0,027	0,019	0,037	0,043
B	0,002	1,087	0,014	0,136	0,010	0,111	0,002	0,002	0,004	0,001	0,002	0,008	0,003	0,005	0,004	0,004	0,007
C	0,053	0,029	1,161	0,014	0,116	0,187	0,031	0,025	0,254	0,002	0,037	0,037	0,027	0,034	0,045	0,105	0,057
D	0,004	0,028	0,010	1,743	0,071	0,039	0,019	0,012	0,011	0,009	0,008	0,015	0,029	0,034	0,014	0,022	0,073
E	0,000	0,004	0,001	0,006	1,039	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,001	0,006
F	0,015	0,004	0,005	0,001	0,015	1,013	0,003	0,004	0,004	0,000	0,011	0,061	0,001	0,015	0,022	0,012	0,010
G	0,019	0,028	0,079	0,064	0,050	0,081	1,019	0,058	0,076	0,006	0,019	0,018	0,036	0,031	0,030	0,055	0,034
H	0,009	0,017	0,024	0,025	0,018	0,025	0,110	1,079	0,023	0,007	0,013	0,007	0,098	0,100	0,025	0,031	0,024
I	0,001	0,000	0,001	0,002	0,001	0,001	0,009	0,001	1,002	0,000	0,001	0,000	0,002	0,036	0,011	0,023	0,018
J	0,003	0,006	0,009	0,014	0,034	0,029	0,055	0,022	0,023	1,346	0,045	0,026	0,080	0,026	0,032	0,034	0,057
K	0,005	0,004	0,009	0,036	0,008	0,018	0,053	0,015	0,009	0,001	1,027	0,003	0,021	0,011	0,008	0,015	0,029
L	0,001	0,005	0,002	0,002	0,002	0,002	0,008	0,050	0,001	0,000	0,006	1,001	0,005	0,010	0,011	0,005	0,029
M,N	0,002	0,010	0,002	0,014	0,004	0,005	0,009	0,031	0,002	0,005	0,025	0,007	1,055	0,030	0,015	0,012	0,003
O	0,002	0,000	0,001	0,003	0,001	0,000	0,001	0,005	0,001	0,000	0,006	0,003	0,023	1,005	0,006	0,085	0,001
P	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000	0,002	1,010	0,001	0,001
Q	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,005	1,007	0,001
R,S,T,U	0,002	0,007	0,006	0,004	0,023	0,002	0,006	0,001	0,008	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,008	0,002	1,060

Sumber: Tabel I-O Provinsi Lampung 2016 (data diolah)

Gambar 4 menampilkan diagram tebar Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks

Derajat Kepekaan (IDK) lapangan usaha di Provinsi Lampung. Dengan menggunakan

diagram tebar tersebut maka dapat diketahui sektor kunci (*key sector*) atau sektor yang memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Sektor kunci merupakan sektor yang memiliki Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) yang lebih besar dari satu. Berdasarkan gambar 4, dapat diamati dimana sektor kunci di Provinsi Lampung adalah industri pengolahan (C) serta

pengadaan listrik dan gas (D). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan (C) serta pengadaan listrik dan gas (D) memiliki keterkaitan hulu maupun hilir yang tinggi, atau dengan kata lain sektor-sektor tersebut memiliki pengaruh cukup dominan terhadap sektor lain dalam perekonomian Provinsi Lampung

Sumber: Tabel I-O Provinsi Lampung 2016 (data diolah)

Gambar 4. Diagram tebar Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) lapangan usaha di Provinsi Lampung tahun 2016

Gambar 5 menampilkan pengganda output dan pengganda Nilai Tambah Bruto (NTB) lapangan usaha di Provinsi Lampung terhadap total perekonomian Lampung pada tahun 2016. Berdasarkan gambar 5, sektor yang memiliki nilai pengganda output terbesar adalah pengadaan listrik dan gas (D) yaitu sebesar 2,08. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan dimana apabila permintaan akhir sektor pengadaan listrik dan gas (D) meningkat sebesar Rp1.000 maka akan meningkatkan output perekonomian di Provinsi Lampung sebesar Rp2.080. Namun, jika diamati nilai pengganda NTBnya, sektor pengadaan listrik dan gas (D) memiliki nilai pengganda yang paling kecil dibandingkan dengan sektor lain yaitu sebesar 0,47. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan

dimana apabila permintaan akhir sektor pengadaan listrik dan gas (D) meningkat sebesar Rp1.000 maka akan meningkatkan NTB perekonomian di Provinsi Lampung sebesar Rp470. Selanjutnya, sektor yang memiliki nilai pengganda output terkecil adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) yaitu sebesar 1,17. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan dimana apabila permintaan akhir sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) meningkat sebesar Rp1.000 maka akan meningkatkan output perekonomian di Provinsi Lampung sebesar Rp1.170. Jika diamati nilai pengganda NTBnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) memiliki nilai pengganda paling besar dibandingkan dengan sektor lain yaitu sebesar 0,93. Nilai

tersebut dapat diinterpretasikan dimana apabila permintaan akhir sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) meningkat sebesar Rp1.000 maka akan meningkatkan NTB perekonomian di Provinsi Lampung sebesar Rp930.

Berdasarkan penjelasan dari kedua sektor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu sektor yang memiliki nilai pengganda output besar belum tentu memiliki nilai pengganda NTB yang besar pula. Demikian juga sebaliknya, suatu sektor yang memiliki nilai pengganda output kecil belum tentu memiliki nilai pengganda NTB yang kecil pula. Jika

kembali mengulas gambar 2, maka dapat diamati bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) memiliki nilai rasio NTB yang paling tinggi sedangkan pengadaan listrik dan gas (D) memiliki nilai rasio NTB yang relatif paling kecil. Dengan demikian dari penjelasan nilai angka pengganda NTB dan rasio NTB tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) merupakan sektor yang efisien dalam perekonomian Provinsi Lampung dibandingkan dengan sektor lainnya. Sedangkan pengadaan listrik dan gas (D) merupakan sektor yang kurang efisien.

Sumber: Tabel I-O Provinsi Lampung 2016 (data diolah)

Gambar 5. Pegganda output dan pengganda Nilai Tambah Bruto (NTB) lapangan usaha di Provinsi Lampung terhadap total perekonomian Lampung tahun 2016.

Gambar 6 menampilkan pengganda output dan pengganda Nilai Tambah Bruto (NTB) lapangan usaha di Provinsi Lampung terhadap total perekonomian nasional pada tahun 2016. Berdasarkan gambar 6, sektor pengadaan listrik dan gas (D) juga memiliki nilai pengganda output terbesar yaitu sebesar 2,92 terhadap perekonomian nasional. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan dimana apabila permintaan akhir sektor pengadaan listrik dan gas (D) di Provinsi Lampung meningkat sebesar Rp1.000 maka akan meningkatkan output perekonomian Indonesia sebesar Rp2.920. Selanjutnya, sektor yang memiliki nilai pengganda output terkecil adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) yaitu sebesar 1,24. Nilai tersebut dapat

diinterpretasikan dimana apabila permintaan akhir sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) di Provinsi Lampung meningkat sebesar Rp1.000 maka akan meningkatkan output perekonomian di Provinsi Lampung sebesar Rp1.240. Jika diamati nilai pengganda NTBnya, sektor informasi dan komunikasi (J) memiliki nilai pengganda paling besar dibandingkan dengan sektor lain yaitu sebesar 0,98. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan dimana apabila permintaan akhir sektor informasi dan komunikasi (J) meningkat sebesar Rp1.000 maka akan meningkatkan NTB perekonomian Indonesia sebesar Rp980. Sektor transportasi dan pergudangan (H) memiliki nilai pengganda NTB paling kecil dibandingkan dengan sektor lain yaitu sebesar

0,78. Nilai tersebut dapat meningkat sebesar Rp1.000 maka akan diinterpretasikan dimana apabila permintaan meningkatkan NTB perekonomian Indonesia akhir transportasi dan perdagangan (H) sebesar Rp780.

Sumber: Tabel IRIO Indonesia 2016 (data diolah)

Gambar 6. Pengganda output dan pengganda Nilai Tambah Bruto (NTB) lapangan usaha di Provinsi Lampung terhadap total perekonomian nasional tahun 2016

Analisis Keterkaitan Antar Wilayah

Perekonomian Provinsi Lampung tidak hanya berkaitan hanya terkait dengan sektor-sektor yang ada di dalamnya, melainkan juga berkaitan dengan perekonomian wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Gambar 7 menunjukkan pola perdagangan input antara antar wilayah Provinsi Lampung dengan pulau-pulau di Indonesia pada tahun 2016. Berdasarkan gambar 7 dapat diamati bahwa setiap wilayah di Indonesia masih didominasi oleh perdagangan

input antara intrawilayah (dalam wilayahnya masing-masing) termasuk Provinsi Lampung. Hal menarik yang dapat diamati adalah dimana perdagangan input antara Provinsi Lampung lebih didominasi oleh perdagangan dengan wilayah Pulau Jawa dibandingkan dengan Pulau Sumatera itu sendiri. Perdagangan Provinsi Lampung dengan Pulau Jawa tersebut lebih mengarah pada Provinsi Lampung sebagai penghasil input dan Pulau Jawa sebagai pengolah

Wilayah	Lampung	Sumatera (selain Lampung)	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua
Lampung	146.952	14.063	28.653	380	1.689	203	734
Sumatera (selain Lampung)	14.165	1.566.084	242.597	8.648	14.197	6.355	3.394
Jawa	24.370	228.883	5.296.438	77.504	117.960	91.108	41.788
Bali & Nusa Tenggara	421	5.094	24.007	193.330	4.321	2.535	1.588
Kalimantan	1.298	9.258	123.597	7.743	598.930	27.168	6.584
Sulawesi	1.028	9.926	63.258	10.785	16.984	392.704	7.344
Maluku & Papua	346	10.109	37.496	745	1.864	2.176	130.039
TOTAL	188.581	1.843.418	5.816.046	299.135	755.944	522.249	191.470

Sumber: Tabel IRIO Indonesia 2016 (data diolah)

Gambar 7. Pola perdagangan input antara antar wilayah Provinsi Lampung dengan pulau-pulau di Indonesia tahun 2016 (miliar rupiah)

Untuk analisis keterkaitan wilayah secara lebih detail, pada gambar 9 disajikan peta sebaran dampak perubahan permintaan akhir Provinsi Lampung terhadap output provinsi lainnya pada tahun 2016. Berdasarkan gambar 9 tersebut, perubahan permintaan akhir di Provinsi Lampung memiliki dampak yang besar terhadap output Provinsi Sumatera Selatan serta provinsi-provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. Dampak terhadap output yang paling besar diterima oleh Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 41,54. Artinya, jika terjadi peningkatan dalam permintaan akhir di Provinsi Lampung sebesar Rp1.000 maka akan berdampak pada meningkatnya output perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp41,54.

Gambar 10 menyajikan peta sebaran dampak perubahan permintaan akhir Provinsi Lampung terhadap NTB provinsi lainnya pada tahun 2016. Berdasarkan gambar 10 tersebut, perubahan permintaan akhir di Provinsi Lampung memiliki dampak yang besar terhadap NTB Provinsi Sumatera Selatan serta provinsi-provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. Dampak terhadap NTB yang paling besar diterima oleh Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 21,53. Artinya, jika terjadi peningkatan dalam permintaan akhir di Provinsi Lampung sebesar Rp1.000 maka akan berdampak pada meningkatnya NTB perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp21,53.

Sumber: Tabel IRIO Indonesia 2016 (data diolah)

Gambar 10. Peta sebaran dampak perubahan permintaan akhir Provinsi Lampung terhadap NTB provinsi lainnya tahun 2016 (rupiah)

Perekonomian Provinsi Lampung dapat dipengaruhi juga oleh perubahan permintaan akhir di provinsi-provinsi di luar Provinsi Lampung. Gambar 11 menyajikan dampak perubahan permintaan akhir provinsi lain terhadap output dan NTB Provinsi Lampung pada tahun 2016. Berdasarkan gambar 11 tersebut, perubahan permintaan akhir di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Banten memberikan dampak terbesar baik

terhadap output maupun NTB Provinsi Lampung. Dampak terhadap output paling besar diberikan oleh Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 25,76. Artinya, peningkatan dalam permintaan akhir di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1.000 maka akan berdampak pada meningkatnya output perekonomian di Provinsi Lampung sebesar Rp25,76. Sumatera Selatan juga memberikan dampak terhadap NTB paling besar yaitu sebesar 14,28. Artinya,

peningkatan dalam permintaan akhir di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1.000 maka akan berdampak pada meningkatnya

NTB perekonomian di Provinsi Lampung sebesar Rp25,76.

Sumber: Tabel IRIO Indonesia 2016 (data diolah)

Gambar 11. Dampak perubahan permintaan akhir provinsi lain terhadap output dan NTB Provinsi Lampung tahun 2016 (rupiah)

Kesimpulan

Sektor kunci di Provinsi Lampung adalah industri pengolahan (C) serta pengadaan listrik dan gas (D). Sektor pengadaan listrik dan gas (D) memiliki nilai pengganda output terbesar baik terhadap perekonomian Provinsi Lampung maupun terhadap perekonomian nasional. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (A) memiliki nilai pengganda NTB yang relatif paling besar baik terhadap perekonomian Provinsi Lampung maupun terhadap perekonomian nasional. Jika dilihat dari pola perdagangan input antarannya, perdagangan input antara Provinsi Lampung secara umum lebih didominasi oleh perdagangan dengan wilayah Pulau Jawa dibandingkan dengan Pulau Sumatera. Selanjutnya, apabila dilihat menurut provinsinya, perubahan permintaan akhir di Provinsi Lampung memiliki dampak yang besar terhadap output dan NTB Provinsi Sumatera Selatan serta provinsi-provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi

Jawa Tengah. Output dan NTB Provinsi Lampung juga dipengaruhi oleh perubahan permintaan akhir di provinsi-provinsi di luar Provinsi Lampung terutama oleh Provinsi Sumatera Selatan.

References

- Arman dkk. (2016). Dampak Keterkaitan Ekonomi Pulau Sulawesi, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur terhadap Ekonomi Wilayah. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(1): 997-109.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tabel Input-Output Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Berita Resmi Statistik*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (1999). *Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input-Output*. BPS. Jakarta.
- Chen, Z., Liu, Y., Zhang, Y., & Zhong, Z. (2020). Interregional Economic Spillover and Carbon Productivity Embodied in Trade: Empirical Study from the Pan-Yangtze River Delta Region. *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 7390-7403.
- Daryanto, A., & Hafizrianda, Y. (2010). Analisis Input-Output dan Social Accounting Matrix untuk Pembangunan Ekonomi Daerah. IPB Press. Bogor.
- Isard, W. (1951). Interregional and regional input output analysis: A model of a space-economy. *The Review of Economic and Statistics*, Vol. 33-318.

- Khairunnas, Djaimi Bakce, & Susi Edwina. (2014). Analisis Sektor Kunci dalam Perekonomian Provinsi Riau: Analisis Input-Output. *Indonesian Journal of Agricultural Economics*, 5(2): 47-66.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income nequality. *The American Economic Association*, 45(1): 1-28
- Miller, Ronald E dan Peter H. Blair. (2009). *Input output analysis: Foundations and Extensions*. Cambridge: University Press.
- Rasmussen, P.N. (1958). *Studies in Intersectoral Relations*. Amsterdam: North-Holland PC.
- Redaputri, Appin Purisky dan Barusman, M.Yusuf S. (2018). Strategi Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 18(2): 86-93.
- Suratman, Eddy dan Thomas Tony Irawan. (2009). Sektor Kunci dalam Perekonomian Kabupaten Sanggau: Analisis Input-Output. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 9(2): 127-142.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zulkarnain, Rizky. (2021). *Linkage Antar Sektor dan Antar Provinsi dari Bali*. Seminar Statistik Nasional Politeknik Statistik STIS.